

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: <b>Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya untuk penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNBPN serta sumber penerimaan lainnya. Sedangkan untuk penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana realisasi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP
Rumus Pengukuran	: Jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan. - Untuk PNBPN berdasarkan bukti setor - Untuk Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan - Untuk PAD berdasarkan bukti setor
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Perpres No 192 Tahun 2014 tentang BPKP 2. UU No 6 Tahun 2006 jo. UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBPN 5. UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN 6. PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN 7. PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP 8. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian BMN 9. Kerangka acuan pengawasan optimalisasi penerimaan negara (TOPN)
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: 1. Pengawasan atas penerimaan negara/daerah oleh BPKP harus berdasarkan penugasan / permintaan dari pejabat yang berwenang 2. Permintaan pengawasan atas penerimaan negara/daerah dari K/L/D yang berwenang cenderung menurun
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP dan APD
Periode Pengukuran	: Tahunan, disajikan per triwulan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LHP dan/atau bukti setor

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Potensi penerimaan negara/daerah yang diidentifikasi dapat menambah target penerimaan negara/daerah yang ditetapkan K/L/D berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP Potensi Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya untuk potensi penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNBPN serta sumber penerimaan lainnya. Sedangkan untuk potensi penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana potensi penerimaan negara/ daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP
Rumus Pengukuran	: Jumlah perkiraan potensi penerimaan negara/daerah yang dapat meningkat melalui rekomendasi hasil pengawasan
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Perpres No 192 Tahun 2014 tentang BPKP 2. UU No 6 Tahun 2006 jo UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBPN 5. UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN 6. PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN 7. PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP 8. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian BMN 9. Kerangka kerja pengawasan optimalisasi penerimaan negara (TOPN)
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: 1. Keterbatasan akses informasi potensi penerimaan 2. Pengawasan atas penerimaan Pajak maupun PNBPN oleh BPKP harus berdasarkan penugasan / permintaan dari pejabat yang berwenang 3. Permintaan pengawasan atas penerimaan negara dari K/L/D yang berwenang bersifat insidental
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP dan APD
Periode Pengukuran	: Tahunan, disajikan per triwulan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LHP

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan / pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP
Tujuan	: Menilai kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku
Rumus Pengukuran	: 1. Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan: - dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat - rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat - ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil 2. Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit claim/verifikasi tagihan, koreksi cost-recovery, audit penyesuaian harga, audit cost-saving, dsb
Jenis pengawasan	: Reviu tunda bayar, audit klaim ( <i>price adjustment</i> /penyesuaian harga)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Perpres 192 / 2014 tentang BPKP 2. Inpres / Perpres yang menugaskan BPKP 3. Regulasi terkait <i>price adjustment</i> 4. PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran (terbit setiap tahun)
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Pengawasan oleh BPKP harus berdasarkan penugasan / permintaan dari K/L/D yang akan melaksanakan revisi anggaran dalam rangka pembayaran, sehingga sulit diprediksi
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP, APD dan AN
Periode Pengukuran	: Tahunan, disajikan per triwulan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LHP

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	: <b>Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara
Tujuan	: Menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset negara
Rumus Pengukuran	: Nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan contoh: Audit Investigatif, Audit PKKN
Jenis pengawasan	: Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Perpres 192 / 2014 tentang BPKP 2. <i>Loan Agreement</i> yang mengamankan pengawasan kepada BPKP 3. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan & Pengendalian BMN
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: 1. UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 2. Pengawasan oleh BPKP dilakukan atas dasar penugasan / permintaan dari pihak/instansi yang berwenang
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP, APD, AN dan Investigasi
Periode Pengukuran	: Tahunan, disajikan per triwulan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LHP

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI PPKD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan dana transfer dalam rupiah.
Jenis Pengawasan	: <i>Assurance</i> kepada pemda melalui Evaluasi/Audit
Tujuan	: Menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan perundangan yang berlaku
Rumus Pengukuran	: Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan dana transfer dalam rupiah.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian Teknis.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: ancaman tuntutan hukum terhadap produk pengawasan BPKP, pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pelaksanaan pengawasan di lapangan, sikap ego sektoral dari stakeholders atas pelaksanaan program pembangunan termasuk sharing data sistem informasi, keterbatasan jumlah SDM, adanya penyesuaian anggaran sehubungan pandemi COVID-19, sarana prasarana masih perlu di lengkapi (Komputer, Jaringan, dll)
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LHP

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI PPKD

Kode Sasaran Program (*Outcome*) :

Pernyataan *Outcome* : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Indikator Kinerja	:	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator ini menunjukkan nilai penyelamatan pembiayaan daerah oleh kabupaten/kota.
Jenis Pengawasan	:	<i>Assurance</i> kepada pemda melalui Evaluasi/Audit
Rumus Pengukuran	:	Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan pembiayaan daerah dalam rupiah.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian Teknis.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	ancaman tuntutan hukum terhadap produk pengawasan BPKP, pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pelaksanaan pengawasan di lapangan, sikap ego sektoral dari stakeholders atas pelaksanaan program pembangunan termasuk sharing data sistem informasi, keterbatasan jumlah SDM, adanya penyesuaian anggaran sehubungan pandemi COVID-19, sarana prasarana masih perlu di lengkapi (Komputer, Jaringan, dll)
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang APD
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	LHP

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah Program Prioritas (PP) yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tertentu yang mencapai target yang ditetapkan sesuai indikator kinerjanya.
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana keberhasilan program prioritas nasional dalam mencapai target yang ditetapkan
Rumus Pengukuran	: Jumlah PP yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah  Apabila data capaian target belum dapat dipastikan, maka dapat menggunakan data capaian sementara atau prognosis/perkiraan
Jenis pengawasan	: Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - PP 60 tahun 2008 tentang SPIP - Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Belum ditetapkannya koordinator program prioritas
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: - RKP Tahun 2020 - RPJM Tahun 2020-2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan
Rumus Pengukuran	: Jumlah KP yang diawasi dengan kegiatan pengawasan
Jenis pengawasan	: Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - PP 60 tahun 2008 tentang SPIP - Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Belum ada penetapan koordinator kegiatan prioritas
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP dan APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: - RKP Tahun 2020 - RPJM Tahun 2020-2024



**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tertentu yang mencapai target yang ditetapkan sesuai indikator kerjanya.
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan
Rumus Pengukuran	: Jumlah KP yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah Apabila data capaian target belum dapat dipastikan, maka dapat menggunakan data capaian sementara atau prognosis/perkiraan
Jenis pengawasan	: Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - PP 60 tahun 2008 tentang SPIP - Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Belum ada penetapan koordinator kegiatan prioritas
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang IPP dan APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: - RKP Tahun 2020 - RPJM Tahun 2020-2024

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan pada tahun tertentu yang mencapai target yang ditetapkan
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana keberhasilan proyek strategis nasional mencapai target yang ditetapkan
Rumus Pengukuran	: Jumlah PSN yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah  Apabila data capaian target belum dapat dipastikan, maka dapat menggunakan data capaian sementara atau prognosis/perkiraan
Jenis pengawasan	: Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - PP 60 tahun 2008 tentang SPIP - Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP - Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN - Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: -
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang AN
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: Kementerian PUPR

**DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH  
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI PPKD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** :

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dilakukan pengawasan yang tercapai sesuai target
<b>Jenis pengawasan</b>	: - <i>Assurance</i> kepada pemda melalui Evaluasi/Audit
Rumus Pengukuran	: Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah  Apabila data capaian target belum dapat dipastikan, maka dapat menggunakan data capaian sementara atau prognosis/perkiraan
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: Sesuai core competency BPKP, Struktur kelembagaan BPKP dengan 34 Perwakilan BPKP di seluruh provinsi, Komitmen untuk membangun Akuntabilitas Program Lintas Sektoral, hubungan yang baik dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian Teknis.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Ancaman tuntutan hukum terhadap produk pengawasan BPKP, pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pelaksanaan pengawasan di lapangan, sikap ego sektoral dari stakeholders atas pelaksanaan program pembangunan termasuk sharing data sistem informasi, keterbatasan jumlah SDM, adanya penyesuaian anggaran sehubungan pandemi COVID-19, sarana prasarana masih perlu di lengkapi (Komputer, Jaringan, dll)
Unit Kerja Pelaksana	: Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: -

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI PPKD

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** :

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan dari pemerintah desa mencapai kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM Desa)
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: melakukan bimtek kepada pemerintah desa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun
Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan	: kegiatan audit kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa atas sampel desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rumus Pengukuran	: Jumlah desa yang berkinerja baik dibagi dengan jumlah seluruh desa yang diaudit kinerja
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: Antara lain: kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT, hubungan yang baik dengan pemda dan pemdes
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Antara lain: ketidakcukupan anggaran, ketidakcukupan SDM BPKP, hubungan yang tidak baik dengan kemendagri dan Kemendes PDTT
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: RKP Tahun 2020

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional sering timbul permasalahan yang dapat menghambat. Penyebabnya dapat merupakan faktor ego sektoral, masalah interpretasi regulasi, atau kondisi di lapangan berbeda dengan apa yang
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Evaluasi HKP berbasis kasus. Untuk memberi kontribusi lebih nyata kepada pencapaian sasaran strategis (meningkatnya akuntabilitas pembangunan nasional) dengan IKU pencapaian program, kegiatan, dan proyek prioritas strategis nasional sesuai target (IKU-2), maka diperlukan kerjasama antar unit kerja ke deputian dalam hal pencarian informasi mengenai hambatan yang terkait langsung dengan pencapaian PP/KP/ PPS yang potensial dapat diselesaikan dengan intervensi pengawasan BPKP, khususnya melalui EHKP. Dengan kolaborasi informasional, penugasan EHKP meski case-based boleh disebut proaktif.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jml LEHKP yang kesepakatannya terlaksana}}{\text{Total penugasan EHKP yang diterbitkan}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - Dari aspek metodologi, telah tersedia pedoman yang established yaitu PPKBI (Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017) sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan pengawasan evaluasi HKP bagi seluruh auditor BPKP meski masih terbuka untuk penyempurnaan. - BPKP memiliki cukup kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) dalam melaksanakan penugasan evaluasi HKP yang efektif. - Kesiediaan pimpinan terlibat secara langsung dalam proses evaluasi HKP dari aspek komunikasi antar lembaga.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: - Auditor generasi baru yang menguasai kompetensi mediasi/konsiliasi masih terbatas. - Karakteristik HKP selalu melibatkan unsur konflik/dispute sehingga para pihak sulit dipertemukan, membuat kompromi/ kesepakatan, atau potensial menarik diri dari kesepakatan yang sudah dibuat.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Investigasi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	: Sistem informasi deputi bidang investigasi

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik</b>
Definisi Indikator Kinerja	: BUMN dengan tata kelola korporasi baik adalah BUMN yang memperoleh predikat penerapan GCG Baik
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Melakukan assessment GCG dan mendorong BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi AOI yang diberikan BPKP
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Assessment/Diagnostic Assessment GCG pada BUMN
Rumus Pengukuran	: Jumlah BUMN dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMN pada sektor yang bersangkutan
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: Sebagian besar BUMN mempercayakan penilaian GCG nya kepada BPKP sehingga memungkinkan bagi BPKP untuk memantau rekomendasi AOI yang diberikan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Kesulitan memantau tindak lanjut dan memastikan penilaian sesuai standar, untuk GCG BUMN yang tidak diases oleh BPKP
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: Laporan hasil assessment GCG yang dilakukan BPKP ataupun assessor lain

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha**

<b>Indikator Kinerja</b>	:	<b>Persentase BUMD dengan tata kelola korporasi baik</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BUMD dengan tata kelola korporasi baik adalah BUMD yang memperoleh predikat penerapan GCG Baik
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Melakukan assessment GCG dan mendorong BUMD untuk menindaklanjuti rekomendasi AOI yang diberikan BPKP
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	:	Assessment/Diagnostic Assessment GCG pada BUMD
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BUMD dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMD pada sektor yang bersangkutan
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Sebagian besar BUMD mempercayai penilaian GCG nya kepada BPKP sehingga memungkinkan bagi BPKP untuk memantau rekomendasi AOI yang diberikan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kesulitan memantau tindak lanjut dan memastikan penilaian sesuai standar, untuk GCG BUMD yang tidak diases oleh BPKP
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan hasil assessment GCG yang dilakukan BPKP ataupun assessor lain

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>:</b>	<b>Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BUMD dengan kinerja "Sehat" adalah BUMD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat".
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Melakukan audit/evaluasi kinerja pada BUMD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan oleh BPKP
Kegiatan pengawasan yang	:	Audit/Evaluasi Kinerja pada BUMD
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BUMD dengan kinerja minimal "Sehat" dibagi jumlah total BUMD
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Sebagian besar BUMD mempercayakan evaluasi kinerjanya dilakukan oleh BPKP sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi dan pengukuran
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan sumber daya di BUMD yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan Kinerja Tahunan



## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>:</b>	<b>Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BLUD dengan kinerja "Sehat" adalah BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat".
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Melakukan audit kinerja pada BLUD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan oleh BPKP
Kegiatan pengawasan yang	:	Audit/Evaluasi Kinerja pada BLUD
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BLUD dengan kinerja minimal "Sehat" dibagi jumlah total BLUD
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Sebagian besar BLUD mempercayakan audit/evaluasi kinerjanya dilakukan oleh BPKP sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan sumber daya di BLUD yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan Kinerja Tahunan

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha**

<b>Indikator Kinerja</b>	:	<b>Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah BUMDes yang dapat menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada BUMDes dan memantau perkembangan BUMDes dalam usahanya menyusun laporan keuangan
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	:	Kegiatan sosialisasi dan bimtek
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah adanya pendampingan oleh BPKP.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Beberapa Pemda telah bekerja sama dengan BPKP untuk membantu BUMDes di wilayahnya.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan sumber daya BUMDes sehingga hasil pendampingan tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan Monitoring, Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Pengawasan BPKP bidang investigasi yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi. Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Audit investigatif, Audit PKKN, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi sepenuhnya berbasis kasus, yakni dilakukan hanya sepanjang terdapat permintaan kepada BPKP yang memenuhi persyaratan berdasarkan ekspose dan/atau penelitian awal. Dalam hal audit investigatif bersumber dari inisiatif BPKP, maka kegiatan yang dilakukan adalah penelitian awal yang mencakup pencarian dan analisis informasi dari berbagai sumber.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu lainnya bidang investigasi
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jml KLPBU/ APH yang menindaklanjuti rekomendasi}}{\text{Jml penugasan pengawasan represif}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - Dari aspek metodologi, telah tersedia pedoman yang established yaitu Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI), Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017 sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan audit investigatif, PKKN, pemberian keterangan ahli bagi seluruh auditor BPKP. - BPKP memiliki kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) dalam melaksanakan audit investigatif/PKKN.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: - Auditor generasi baru yang menguasai kompetensi audit investigatif masih cukup terbatas. - Kesulitan dalam proses pengumpulan bukti seringkali terjadi karena sifat fraud yang memang tersembunyi.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Investigasi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	: Database hasil pengawasan bidang investigasi

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Beranjak dari identifikasi penyebab korupsi yang terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek individu, aspek sistem dan aspek budaya, BPKP telah menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi melalui berbagai instrumen pengawasan, dari pembinaan SPIP, GCG, dan pengawasan intern lainnya yang mengelola risiko operasional serta instrumen yang secara khusus berfokus pada risiko korupsi. Berbagai upaya tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga strategi: edukatif, preventif dan represif. Strategi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Strategi ini menjadikan pembelajaran sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi, disamping proses preventif dan represif. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Melalui pembelajaran informal yang terstruktur akan terjadi proses interaksi pemikiran dan pengetahuan, melahirkan individu yang mengerti dan memahami korupsi dan anti korupsi, selanjutnya termotivasi untuk melakukan tindakan anti korupsi melalui sarana sistem pengaduan internal. Dengan berjalanya waktu, melalui proses interaksi peserta belajar di lingkungan organisasinya diharapkan terjadi proses pembiasaan perilaku anti korupsi yang mengarah pada pembentukan budaya organisasi anti korupsi. Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui Fraud Control Plan (FCP) maupun Fraud Risk Assessment (FRA). Sistem diibaratkan sebagai lingkungan yang memiliki daya cegah bagi individu yang memiliki motivasi bertindak koruptif. Berbagai atribut dalam FCP dirancang untuk mewujudkan lingkungan yang anti korupsi tersebut. Kinerja efektivitas hasil pengawasan didefinisi sebagai persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan edukatif dan preventif, yang diukur dengan membandingkan jumlah K/L/P/BU yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan edukatif dan preventif dengan jumlah KLPBU sasaran pengawasan edukatif dan preventif.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Penyusunan dan penyempurnaan pedoman, workshop pedoman.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Bimbingan teknis FCP, atau FCP tematik, misalnya WBS, fasilitasi penyelenggaraan MPAK untuk membentuk KomPAK, pelaksanaan FRA, Fasilitasi pengukuran efektivitas pengendalian korupsi (EPK)
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi}}{\text{Jumlah KLPBU sasaran pengawasan preventif/edukatif}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - Perpres 192 tahun 2014 yang mengatur kewenangan fungsi pengawasan pencegahan korupsi - Ada regulasi yang mendukung, yakni Perpres 54 2018 tentang stranas PK yang mengharuskan setiap K/L dan pemda untuk melakukan aksi pencegahan korupsi.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: - BPKP tidak termasuk dalam timnas stranas PK menurut Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 sehingga tidak terlibat langsung dalam koordinasi-koordinasi penetapan dan pelaksanaan aksi pencegahan yang ditetapkan Timnas. - Kompetensi di bidang pencegahan yang multidisipliner tidak banyak dikuasai auditor BPKP. - Terbatasnya sumber daya selain sejumlah hal yang uncontrolable dalam memelihara aktivitas komunitas pembelajar antikorupsi yang dibentuk.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Investigasi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: Hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik</b>
Definisi Indikator Kinerja	: IEPK merupakan komposit dari tiga pilar yang merepresentasi pengelolaan risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif GRC. Pilar pertama adalah kapabilitas yang merupakan interseksi antara kapasitas, power, sumber daya, dan kompetensi lembaga yang menjadi kekuatan dari dalam (inside out) yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif. Pilar ini bertumpu pada komitmen puncak yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan, struktur, metoda, dan dukungan sumber daya yang eksplisit untuk tujuan mengelola risiko korupsi. Asesmen risiko korupsi secara komprehensif dan pengembangan infrastruktur cegah & deteksi, seperti sistem antisuap dan WBS, misalnya, menandai keberadaan kapabilitas ini. Pilar kedua adalah implementedness dari strategi cegah dan deteksi, yakni seberapa konkret strategi pencegahan diterapkan. Pilar ini menunjukkan seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi tumbuh sebagai buah atas pengembangan kapabilitas di pilar satu. Pilar ini ditandai dengan tingkat kepedulian, transparansi, dan partisipasi pegawai/ stakeholder dalam WBS, serta keberadaan kepemimpinan etis dan iklim etis yang dirasakan pegawai dan stakeholder. Pilar ketiga adalah dimensi respon, yaitu melihat seberapa jauh konsistensi pengelolaan risiko korupsi diwujudkan. Sistem investigasi, tindakan korektif, termasuk sanksi kepada pelaku, serta frekuensi dan signifikansi peristiwa korupsi yang terjadi dan/atau persepsi korupsi menjadi penanda efektivitas pada pilar ketiga. IEPK berskala 1 s.d. 10, dengan 1 bermakna mutlak takeefektif dan 10 mutlak efektif. Efektivitas pengendalian korupsi dikatakan baik adalah pemaknaan atas kenaikan angka indeks dari waktu ke waktu dan/atau IEPK berada di angka 7 ke atas.  Latar belakang model pengukuran dalam wujud IEPK dikembangkan dengan argumen di bawah ini. Berbagai inisiatif pencegahan dan pengendalian korupsi telah dilakukan BPKP melalui aneka instrumen pengawasan, mulai GCG, MR, hingga instrumen yang berfokus pada risiko korupsi, seperti FCP, FRA, dan MPAK. Pada pendekatan represif, BPKP melakukan AI, PKKN, atau ATT lainnya bidang investigasi. Ketiga strategi dilakukan BPKP dalam rangka membantu instansi mengelola risiko korupsi. Strategi represif melalui beberapa bentuk audit dilakukan sebagai bagian dari konsistensi penegakan aturan yang diharapkan memberikan efek deterrence serta munculnya tindakan korektif. Strategi preventif dan edukatif diwujudkan dalam berbagai aktivitas fasilitasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan, mulai dari a.l. sosialisasi antikorupsi, pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Fraud Control Plan (FCP), FRA, dll. Berbagai upaya di atas, termasuk yang dilakukan oleh lembaga di luar BPKP sepertinya belum terintegrasi dan terukur. Tidak diketahui sampai seberapa jauh kemajuannya dalam kerangka pengelolaan risiko korupsi. Rerangka pengukuran diperlukan untuk itu dengan fungsi utama memberikan landasan bagi penyusunan peta jalan untuk peningkatan efektivitas strategi. Pengembangan model pengukuran indeks EPK oleh BPKP dilakukan untuk memberikan landasan agar ketiga pilar strategi pengendalian korupsi oleh instansi dapat dilaksanakan lebih terukur dan terintegrasi dalam perspektif FRM dan GRC (fraud risk management dan governance-risk-control). Model pengukuran IEPK mengintegrasikan semua upaya manajemen risiko korupsi sekaligus meyakini bahwa upaya tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi ataupun penyelenggaraan program pembangunan yang dimandatkan kepada organisasi.  Pengukuran IEPK menyediakan basis data bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian korupsi
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Melakukan komunikasi untuk meningkatkan akseptabilitas (ownership) instansi ttg urgensi pengelolaan risiko korupsi berikut arti penting pengukuran efektivitasnya; membangun dan menyempurnakan metodologi pengukuran yang sederhana, tetapi kredibel, dan berterima, termasuk menjajaki kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam strategi pencegahan korupsi. Membangun strategi penugasan kolaboratif dengan unit kerja di kedepkatan lain.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Pengukuran IEPK, FCP, FRA, MPAK
Rumus Pengukuran	: Skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (implementedness) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - Ekosistem regulasi antifraud kondusif melalui Perpres No 54 tahun 2018. - PP No 60 tahun 2008 memberikan landasan kewenangan dan kompetensi dalam pembinaan pengendalian internal, bahwa pengukuran EPK dipahami sebagai bagian dari dimensi peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: - Auditor yang menguasai kompetensi dan menaruh minat pada penugasan pencegahan dan pengendalian korupsi masih terbatas - Potensi rendahnya akseptabilitas K/L/P atas kegiatan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi - Model kerja kolaboratif lintas unit kerja relatif sebuah langkah baru
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Investigasi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: Sistem Informasi Deputi Bidang Investigasi

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik</b>
Definisi Indikator Kinerja	: IEPK merupakan komposit dari tiga pilar yang merepresentasi pengelolaan risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif GRC. Pilar pertama adalah kapabilitas yang merupakan interseksi antara kapasitas, power, sumber daya, dan kompetensi lembaga yang menjadi kekuatan dari dalam (inside out) yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif. Pilar ini bertumpu pada komitmen puncak yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan, struktur, metoda, dan dukungan sumber daya yang eksplisit untuk tujuan mengelola risiko korupsi. Asesmen risiko korupsi secara komprehensif dan pengembangan infrastruktur cegah & deteksi, seperti sistem antisuap dan WBS, misalnya, menandai keberadaan kapabilitas ini. Pilar kedua adalah implementedness dari strategi cegah dan deteksi, yakni seberapa konkret strategi pencegahan diterapkan. Pilar ini menunjukkan seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi tumbuh sebagai buah atas pengembangan kapabilitas di pilar satu. Pilar ini ditandai dengan tingkat kepedulian, transparansi, dan partisipasi pegawai/ stakeholder dalam WBS, serta keberadaan kepemimpinan etis dan iklim etis yang dirasakan pegawai dan stakeholder. Pilar ketiga adalah dimensi respon, yaitu melihat seberapa jauh konsistensi pengelolaan risiko korupsi diwujudkan. Sistem investigasi, tindakan korektif, termasuk sanksi kepada pelaku, serta frekuensi dan signifikansi peristiwa korupsi yang terjadi dan/atau persepsi korupsi menjadi penanda efektivitas pada pilar ketiga. IEPK berskala 1 s.d. 10, dengan 1 bermakna mutlak takeefektif dan 10 mutlak efektif. Efektivitas pengendalian korupsi dikatakan baik adalah pemaknaan atas kenaikan angka indeks dari waktu ke waktu dan/atau IEPK berada di angka 7 ke atas.  Latar belakang model pengukuran dalam wujud IEPK dikembangkan dengan argumen di bawah ini. Berbagai inisiatif pencegahan dan pengendalian korupsi telah dilakukan BPKP melalui aneka instrumen pengawasan, mulai GCG, MR, hingga instrumen yang berfokus pada risiko korupsi, seperti FCP, FRA, dan MPAK. Pada pendekatan represif, BPKP melakukan AI, PKKN, atau ATT lainnya bidang investigasi. Ketiga strategi dilakukan BPKP dalam rangka membantu instansi mengelola risiko korupsi. Strategi represif melalui beberapa bentuk audit dilakukan sebagai bagian dari konsistensi penegakan aturan yang diharapkan memberikan efek deterrence serta munculnya tindakan korektif. Strategi preventif dan edukatif diwujudkan dalam berbagai aktivitas fasilitasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan, mulai dari a.l. sosialisasi antikorupsi, pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Fraud Control Plan (FCP), FRA, dll. Berbagai upaya di atas, termasuk yang dilakukan oleh lembaga di luar BPKP sepertinya belum terintegrasi dan terukur. Tidak diketahui sampai seberapa jauh kemajuannya dalam kerangka pengelolaan risiko korupsi. Rerangka pengukuran diperlukan untuk itu dengan fungsi utama memberikan landasan bagi penyusunan peta jalan untuk peningkatan efektivitas strategi. Pengembangan model pengukuran indeks EPK oleh BPKP dilakukan untuk memberikan landasan agar ketiga pilar strategi pengendalian korupsi oleh instansi dapat dilaksanakan lebih terukur dan terintegrasi dalam perspektif FRM dan GRC (fraud risk management dan governance-risk-control). Model pengukuran IEPK mengintegrasikan semua upaya manajemen risiko korupsi sekaligus meyakini bahwa upaya tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi ataupun penyelenggaraan program pembangunan yang dimandatkan kepada organisasi.  Pengukuran IEPK menyediakan basis data bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian korupsi
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Melakukan komunikasi untuk meningkatkan akseptabilitas (ownership) instansi ttg urgensi pengelolaan risiko korupsi berikut arti penting pengukuran efektivitasnya; membangun dan menyempurnakan metodologi pengukuran yang sederhana, tetapi kredibel, dan berterima, termasuk menjajaki kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam strategi pencegahan korupsi. Membangun strategi penugasan kolaboratif dengan unit kerja di kedepuitan lain.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Pengukuran IEPK, FCP, FRA, MPAK
Rumus Pengukuran	: Skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (implementedness) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - Ekosistem regulasi antifraud kondusif melalui Perpres No 54 tahun 2018. - PP No 60 tahun 2008 memberikan landasan kewenangan dan kompetensi dalam pembinaan pengendalian internal, bahwa pengukuran EPK dipahami sebagai bagian dari dimensi peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: - Auditor yang menguasai kompetensi dan menaruh minat pada penugasan pencegahan dan pengendalian korupsi masih terbatas - Potensi rendahnya akseptabilitas K/L/P atas kegiatan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi - Model kerja kolaboratif lintas unit kerja relatif sebuah langkah baru
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Investigasi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: Sistem informasi Deputi Bidang Investigasi

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah APIP K/L/D dengan level kapabilitas APIP $\geq$ Level 3
Rumus Pengukuran	: APIP K/L/D dengan level kapabilitas APIP $\geq$ Level 3; dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L/D
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: SDM Auditor BPKP yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, dan adaptif dalam melakukan tugas assurance dan consulting kepada APIP, SDM BPKP yang tersedia di Perwakilan pada 34 Provinsi seluruh Indonesia dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap APIP Pemda, Hubungan yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: K/L/P belum mencantumkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu IKU, dukungan sumber daya/ anggaran APIP yang belum memadai, jumlah dan kompetensi SDM APIP belum terpenuhi sesuai beban kerja, pengawasan yang dilaksanakan belum terhadap area yang berisiko tinggi, Dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang P3A
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif.
Sumber data	: Laporan Hasil QA; Laporan Pemantauan.

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah SPIP K/L/D dengan level Maturitas SPIP $\geq$ Level 3. Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Rumus Pengukuran	: Jumlah K/L/D dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP $\geq$ Level 3
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: -
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: -
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif.
Sumber data	: Laporan Hasil QA; Laporan Pemantauan.



## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup> :**  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah Pemda Provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI $\geq$ Level 3
Tujuan	: Membina dan memantau penerapan pengelolaan risiko pada Pemda Provinsi yang telah memenuhi karakteristik MRI $\geq$ Level 3
Rumus Pengukuran	: Jumlah Pemda Provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Hasil penilaian MRI

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas  
Pencendalian Intern K/L/P/BU**

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: <b>Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah Pemda Kab/Kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI $\geq$ Level 3
Tujuan	: Membina dan memantau penerapan pengelolaan risiko pada Pemda Kab/Kota yang telah memenuhi karakteristik MRI $\geq$ Level 3
Rumus Pengukuran	: Jumlah Pemda Kab/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Hasil penilaian MRI

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas  
 Pendaan Intern K/L/P/BU**

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	: <b>Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Persentase jumlah pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Antara lain: penetapan base line, pemetaan potensi pemda, penyebaran target pemda ke Perwakilan BPKP, pembuatan pedoman bimkon peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja (Pedoman Bimkon sistem perencanaan, penganggaran, kinerja terintegrasi, Modul bimkon penyusunan ASB dan SSH, bimkon Reviu RKPD, bimkon Reviu RKA, bimkon Reviu LKPD), pengembangan aplikasi SIMDA terintegrasi termasuk CACM (dari perencanaan sampai pertanggungjawaban), pembangunan sistem monitoring daerah untuk BPKP, diseminasi pedoman dan aplikasi ke Perwakilan BPKP, MOU Perwakilan BPKP dengan pemda, pendampingan dan monitoring Perwakilan BPKP ke pemda.
Jenis Pengawasan	: - Consulting kepada pemda melalui Sosialisasi, Workshop, Implementasi, Asistensi, Bimkon, Pendampingan, dan Monitoring serta kegiatan konsultasi lainnya terkait akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah. - Assurance kepada pemda melalui Evaluasi.
Rumus Pengukuran	: (Jumlah pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan dengan jumlah pemda di Indonesia) x 100%.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan kemendagri, Kemendes PDT, pemda dan pemdes
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, ketidakcukupan anggaran, ketidakcukupan SDM BPKP, hubungan yang kurang baik dengan kemendagri, Kemendes PDTT pemda, dan pemdes.
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Laporan Hasil Audit BPK atas LKPD Tahun 2018 dan Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB Tahun 2019 atas SAKIP 2018.

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas  
Pencendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: menunjukkan sejauh mana Deputi PPKD dapat menghasilkan Rekomendasi Strategis disampaikan kepada para stakeholder yaitu Kemendagri dan Kemendes PDTT terkait dengan perbaikan akuntabilitas dan tata Kelola keuangan pemerintahan desa. untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa seperti yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Jenis Pengawasan	: Melakukan kajian atas implementasi UU NO. 6 Tahun tentang desa, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan desa
Rumus Pengukuran	: banyak nya produk rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan oleh Deputi PPKD kepada para stakeholder terkait.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan kemendagri, Kemendes PDT, pemda dan pemdes
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, ketidakcukupan anggaran, ketidakcukupan SDM BPKP, hubungan yang kurang baik dengan kemendagri ,Kemendes PDTT pemda, dan pemdes.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: Dokumen policy brief

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI PPKD**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :

**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** :

**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</b>
Definisi Indikator Kinerja	: menunjukkan sejauh mana tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan
Jenis Pengawasan	: - kegiatan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes - kegiatan bimbingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Menyusun Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Rumus Pengukuran	: analisis perbandingan antara jumlah desa yang telah Menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan kemendagri, pemda dan pemdes
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, ketidakcukupan anggaran, ketidakcukupan SDM BPKP, hubungan yang kurang baik dengan kemendagri, PDDT dan/atau pemda
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	:

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI PPKD

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> :

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai</b>
Definisi Indikator Kinerja	: mengukur sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan
Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan	: Melakukan evaluasi atas implementasi pengelolaan aset desa
Rumus Pengukuran	: menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan kemendagri, pemda dan pemdes
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, ketidakcukupan anggaran, ketidakcukupan SDM BPKP, hubungan yang kurang baik dengan kemendagri, dan/atau pemda.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	:

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas  
Pencendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: mengukur sejauh mana APIP telah mampu melakukan pengawasan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes
Rumus Pengukuran	: Sosialisasi dan asistensi Pengawasan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, kecukupan anggaran, kecukupan SDM BPKP, hubungan yang baik dengan kemendagri, pemda.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, ketidakcukupan anggaran, ketidakcukupan SDM BPKP, hubungan yang kurang baik dengan kemendagri, dan/atau pemda.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang APD
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: Laporan

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>:</b>	<b>Jumlah BUMN dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Melakukan assessment maturitas MR dan mendorong BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi AOI yang diberikan BPKP
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	:	Assessment maturitas MR pada BUMN
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BUMN yang berada pada maturitas MRI $\geq$ Level 3
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Sebagian BUMN mempercayakan BPKP melakukan pendampingan penerapan MR dan assessment maturitas MR sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan sumber daya di BUMN yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan hasil assessment MR



## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja</b>	:	<b>Jumlah BUMD dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Melakukan assessment maturitas MR dan mendorong BUMD untuk menindaklanjuti rekomendasi AOI yang diberikan BPKP
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	:	Assessment maturitas MR pada BUMD
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BUMD yang berada pada maturitas MRI $\geq$ Level 3
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Sebagian BUMD mempercayakan BPKP melakukan pendampingan penerapan MR dan assessment maturitas MR sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan sumber daya di BUMD yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan hasil assessment MR

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>:</b>	<b>Jumlah BLUD dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU		Melakukan assessment maturitas MR dan mendorong BLUD untuk menindaklanjuti rekomendasi AOI yang diberikan BPKP
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	:	Assessment maturitas MR pada BLUD
Rumus Pengukuran	:	Jumlah BLUD yang berada pada maturitas MRI $\geq$ Level 3
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Sebagian BLUD mempercayakan BPKP melakukan pendampingan penerapan MR dan assessment maturitas MR sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan sumber daya di BLUD yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan hasil assessment MR

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Pendampingan peningkatan kapabilitas SPI dan assessment kapabilitas SPI Badan Usaha
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Sosialisasi, bimtek dan assessment kapabilitas SPI
Rumus Pengukuran	: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: Sebagian BUMD mempercayakan BPKP melakukan pendampingan assessment kapabilitas SPI sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Keterbatasan sumber daya di BUMD yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: Laporan hasil asesmen kapabilitas SPI

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

<b>Indikator Kinerja</b>	: <b>Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern <math>\geq</math> Level 3</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	: Pendampingan peningkatan kapabilitas SPI dan assessment kapabilitas SPI Badan Usaha
Kegiatan pengawasan yang dilakukan	: Sosialisasi, bimtek dan assessment kapabilitas SPI
Rumus Pengukuran	: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: Sebagian BLUD mempercayakan BPKP melakukan pendampingan assessment kapabilitas SPI sehingga memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Keterbatasan sumber daya di BLUD yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi tidak optimal
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Akuntan Negara
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: Laporan hasil asesmen kapabilitas SPI

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Upaya strategis dalam pencegahan korupsi dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tujuan	: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Rumus Pengukuran	: Skor Zona Integritas, sesuai dengan kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019
	1. Unit yang sudah selesai dievaluasi oleh kemenpan = menggunakan nilai sesuai laporan hasil evaluasi dari Kemen PANRB
	2. Unit yang sudah dievaluasi oleh Inspektorat sebagai TPI = menggunakan nilai sesuai hasil penilaian Inspektorat
	3. Unit yang sudah melakukan penilaian mandiri, namun belum diajukan ke Inspektorat = diisi dengan total nilai Komponen Pengungkit saja, (tanpa nilai komponen hasil)
	Informasi terkait apakah nilai merupakan hasil penilaian Kemen PANRB, atau Inspektorat, ataupun penilaian mandiri, harus dimuat secara jelas di dalam laporan kinerja
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Belum adanya panduan/pedoman pelaksanaan pembangunan ZI di BPKP
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Kertas Kerja Evaluasi Zona Integritas

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Seberapa banyak upaya peningkatan kompetensi pegawai yang diukur melalui berapa banyak pegawai yang telah mengikuti upaya peningkatan kompetensi
Tujuan	: Memastikan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja individu digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan karier dan peningkatan kompetensi
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang telah memenuhi minimal 80 jam peningkatan kompetensi dalam setahun}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$
	: Peningkatan kompetensi dapat berupa diklat, kursus, PPM, mengundang narasumber, dsb
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: -
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: -
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: dokumen yang berkaitan dengan diklat, kursus, PPM, mengundang narasumber, dsb

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Administrasi SDM dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
Tujuan	: Mendukung kelancaran administrasi SDM
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah pengurusan administrasi kepegawaian} - \text{Jumlah pengurusan administrasi kepegawaian yang terlambat}}{\text{Jumlah pengurusan administrasi kepegawaian}} \times 100\%$
	Pengurusan administrasi kepegawaian meliputi seluruh administrasi kepegawaian seperti: -SK pengangkatan -kenaikan jabatan dan gaji berkala -pengusulan peserta diklat -SK angka kredit -arsip digital penilaian kinerja -dsb
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: -
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: -
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Data Kepegawaian

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup> :**  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Rencana Kerja dan Anggaran satker di Lingkungan BPKP telah disusun sesuai ketentuan dengan didukung dokumen yang memadai dan diselesaikan sesuai tengat waktu
Tujuan	: Meningkatnya kecepatan penyusunan Anggaran BPKP
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah RKA yang disampaikan tepat waktu}}{\text{total jumlah RKA yang disusun dalam satu tahun}} \times 100\%$
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: RKA yang disampaikan oleh unit kerja sesuai batas waktu yang ditetapkan



## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi
Tujuan	: meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan laporan keuangan
Rumus Pengukuran	: hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator	: <b>Bagian Tata Usaha</b>
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: OM SPAN

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Persentase SPM yang terbit tepat waktu</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: SPM yang diterbitkan oleh PP SPM sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
Tujuan	: Memastikan kelancaran operasional organisasi
Rumus Pengukuran	: Jumlah SPM terbit 5 HK setelah berkas lengkap tanpa pengembalian dari KPPN dibagi total SPM dikali 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: - $\frac{\text{Jumlah SPM terbit dalam jangka waktu sesuai ketentuan}}{\text{Total Jumlah SPM terbit}} \times 100\%$
	Jangka waktu: 1. GUP = 4 hari kerja setelah SPP diterima lengkap dan benar 2. LS = 5 hari kerja setelah SPP diterima lengkap dan benar
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: -
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Pengajuan SPM ke KPPN

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP**

**Kode Outcome<sup>1)</sup> :**  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan unit kerja sesuai kaidah SAP
Tujuan	: Agar laporan keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang diterbitkan sesuai dengan SAP}}{\text{Total Jumlah Laporan Keuangan}} \times 100\%$
	: Laporan Keuangan yang diterbitkan sesuai SAP adalah laporan keuangan yang telah disusun, dianalisis dan diterbitkan agar sesuai dengan kaidah SAP, menurut klaim dari masing-masing unit kerja
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	:

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Unit Kerja Mandiri yang Mendapatkan Nilai Baik atas Penilaian Pengelolaan BMN
Tujuan	: Memacu Peningkatkan Pengelolaan BMN menjadi Lebih Baik
Rumus Pengukuran	: Sesuai Form Penilaian Pengelolaan BMN penilaian dilakukan secara self assessment dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum [ sedang dalam proses]
Polaritas	: Semakin tinggi, semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Laporan Hasil Monitoring / Penilaian BMN

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :

Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatkan Kinerja Fungsi Tata Kelola

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Nilai SAKIP Unit Kerja</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Penilaian implementasi SAKIP dengan cakupan: 1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan	: Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah
Rumus Pengukuran	: Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat)
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Self Assesment dengan QA Inspektorat

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome** :  
**Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Kinerja Fungsi Tata Kelola**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>: Nilai Reputasi Unit Kerja (khusus unit Perwakilan)</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai Indeks Reputasi BPKP yang diperoleh dari Survei Reputasi BPKP untuk menilai reputasi BPKP di mata para pemangku kepentingan
Tujuan	: Penilaian reputasi BPKP oleh para pemangku kepentingan
Rumus Pengukuran	: Rata-rata dari hasil penilaian tiap variabel dalam Survei Reputasi BPKP
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: <b>Bagian Tata Usaha</b>
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Akumulatif
Sumber data	: Hasil Survei reputasi BPKP

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : **Meningkatnya Kinerja Fungsi Tata Kelola**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Maturitas SPIP Unit Kerja</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP di BPKP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Tujuan	: untuk mengukur maturitas SPIP BPKP
Rumus Pengukuran	: Sesuai Pedoman Maturitas SPIP di lingkungan BPKP
	Untuk tahun 2020, karena Pedoman SPIP di internal belum ada, maka masih diukur menggunakan capaian 2019
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: <b>Bagian Tata Usaha</b>
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Self Assesment dengan QA Inspektorat

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Kinerja Fungsi Tata Kelola**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Indeks MR Unit Kerja</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Pengelolaan risiko BPKP memenuhi karakteristik MRI $\geq$ Level 3
Tujuan	: Melaksanakan penerapan pengelolaan risiko pada BPKP untuk memenuhi karakteristik MRI $\geq$ Level 3
Rumus Pengukuran	: Indeks MR diukur sesuai Pedoman Manajemen Risiko di Internal BPKP
	Untuk tahun 2020, dikarenakan pedoman belum ada, maka untuk sementara belum bisa diukur
Polaritas	: Semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: <b>Bagian Tata Usaha</b>
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Self Assesment dengan QA Inspektorat



## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Kinerja Fungsi Tata Kelola**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: Jumlah unit kerja yang meningkat indeks kepuasan layanan Ketatausahaan Unit Kerja atas hasil survey kepuasan layanan
Tujuan	: untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan Ketatausahaan Unit Kerja
Rumus Pengukuran	: diukur menggunakan survei kepuasan layanan ketatausahaan
Polaritas	: semakin tinggi semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: <b>Bagian Tata Usaha</b>
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Survey internal ke pegawai

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Meningkatnya Kinerja Fungsi Tata Kelola**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: skor indeks kepuasan atas layanan BPKP kepada stakeholder
Tujuan	: untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan BPKP pada unit kerja stakeholders
Rumus Pengukuran	: diukur menggunakan survei layanan perwakilan
Polaritas	: semakin banyak semakin baik
Cascading Indikator Kinerja	: Bagian Tata Usaha
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Survey eksternal ke stakeholder unit